

IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI SEKRETARIAT PANWASLIH KABUPATEN ACEH SINGKIL

*Implementation Of The Agency Level Financial Application System (Sakti)
At The Panwaslih Secretariat Of Aceh Singkil Regency*

Zuraidah¹, Lisnawati^{*2}

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh

^{*2}Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ubudiyah Indonesia

*Corresponding Author: lisnawati@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aplikasi SAKTI sudah ditetapkan sejak tahun 2022 dan dalam pelaksanaan aplikasinya pegawai yang berwenang mengharapkan adanya pelatihan secara khusus yang dilakukan pemerintah dan tidak hanya pelatihan melalui media sosial sehingga dalam penerapan dapat dilakukan lebih maksimal. Dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Keuangan Pada Panwaslih, sesuai dengan hasil penelitian, Aplikasi SAKTI belum bisa menjamin resiko kesalahan dalam modul administrasi terkait pengelolaan data referensi dan data user SAKTI.

Kata Kunci: *Implementasi, Aplikasi SAKTI, Pengelolaan Keuangan*

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the Agency Level Financial Application System (SAKTI) is financial management at the Panwaslih Secretariat of Aceh Singkil Regency. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive analysis. Based on the research results, it is known that the SAKTI application has been established since 2022 and in implementing is application, authorized employees expect special training from the government and not only training through social media so that its implementation can be carried out more optimally. In order to improve Financial Management at Panwaslih, according to the results of the study, the SAKTI Application cannot guarantee the risk of errors in the administration module related to the management of reference data and SAKTI user data.

Keywords: *Implementation, SAKTI Application, Financial Management*

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga pemilihan Umum di Indonesia semakin kokoh dengan regulasi khusus. Sebelumnya, regulasi tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Dalam undang-undang ini, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang

mengawasi pemilu level pusat dan provinsi bersifat permanen (tetap), sedangkan pada level Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersifat *ad hoc* (bersifat sementara dan akan dibubarkan setelah tahapan selesai). Dalam undang-undang 7 tahun 2017, lembaga pengawas pemilu pada level kabupaten bersifat permanen, dengan periode setiap lima tahunan. Dalam Undang-undang ini disebutkan juga, nomenklatur untuk lembaga

Bawaslu pada level Provinsi dan Kabupaten adalah Panitia Pengawas Pemilihan atau disingkat dengan Panwaslih. Akan tetapi tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu sama dengan Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota di luar Aceh.

Adapun konsekuensi dari ditetapkannya Bawaslu Kabupaten menjadi permanen, maka lembaga ini memiliki kesekretariatan di level kabupaten. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dibantu oleh kepala bidang atau kepala sub bidang yang direkrut dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan beberapa orang staf non PNS atau Pegawai Non PNS. Alhasil, Sekretariat di lingkungan pengawas pemilu yang tadinya bersifat *ad hoc* juga ikut menjadi permanen dan menjadi setingkat Satker (Satuan Kerja) tingkat Kabupaten dan wajib mempertanggungjawaban keuangannya sendiri.

Di lembaga Bawaslu, prinsip pengelolaan keuangan tertuang dalam persekjen (Peraturan Sekjend Bawaslu RI) No. 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam Persekjen ini, di tekankan prinsip Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Keuangan meliputi:

1. Legal, yaitu administrasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan.
2. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan administrasi pertanggungjawaban keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Transparan, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara jelas dan terbuka.
4. Proporsional, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, lembaga non struktural seperti Bawaslu Kabupaten/Panwaslih Kabupaten memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan total volume Anggaran

Belanja dari tahun ke tahun. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Untuk itu di perlukan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 203/PMK.05/2019, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil yang juga bagian dari bawaslu republik Indonesia, menggunakan aplikasi SAKTI sebagai aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan keuangan. Tujuan dari penerapan aplikasi ini adalah untuk menghasilkan pengelolaan keuangan dan laporan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya manajemen keuangan yang baik sesuai prinsip pelaporan keuangan yang baik dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) adalah Sistem Perbendaharaan Anggaran yang juga dioperasikan secara online berbasis web.

Ada penemuan bahwa hanya sekitar 16% proyek IT sektor Inggris yang bisa dinyatakan berhasil, sementara 84% lainnya mengalami kegagalan dalam berbagai tingkatan [1]. Kegagalan tersebut disebabkan oleh unsur *simplicity*, *certainly*, dan *stability* pada sistem yang kurang memadai serta rendahnya dukungan dan kompetensi dari pihak manajerial organisasi. Oleh karena itu, menerapkan SAKTI dengan baik harus menjadi hal utama yang diperhatikan dalam rencana strategis yang dilakukan.

Berdasarkan hasil dari wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan salah seorang staf keuangan Kesekretariatan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil bahwa ada beberapa faktor kendala dalam penerapan SAKTI. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam penerapan SAKTI yaitu staf masih kurang pemahaman terkait penggunaan aplikasi SAKTI dan kurang teliti dalam memasukkan data keuangan, serta kurangnya pengawasan terhadap aplikasi SAKTI sehingga penerapan SAKTI dalam pengelolaan

keuangan di Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dianggap masih belum optimal.

Dari bebarapa faktor kendala SAKTI tersebut maka pegawai keuangan Panwaslih kabupaten Aceh Singkil mengutarakan bahwa ada beberapa dampak dari penerapan dalam aplikasi SAKTI yaitu, terbatasnya ruang belajar bagi operator-operator yang memahami kegunaan SAKTI sehingga kurangnya perkembangan sumber daya manusia. Kemudian SAKTI tidak bisa terintegrasi dengan aplikasi luar. Oleh karena itu instansi lain tidak bisa mengambil data dan menggunakan fitur SAKTI diluar panwaslih Aceh Singkil. Dalam pengimplementasiannya masih terdapat kendala dan hambatan, salah satunya terkait dengan penundaan waktu pelaksanaan terkait dengan plotting SAKTI yang melibatkan banyak pihak, baik dari pihak inisiator program inovasi sendiri dalam hal ini Kesekretariatan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil maupun dari pihak yang nantinya akan menggunakan program tersebut. Melihat jangkauan yang sangat luas dan berskala nasional tentunya program SAKTI menghabiskan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat banyak. Akan tetapi, pengorbanan yang dikeluarkan kenyataannya belum tentu dapat menjamin keberhasilan implementasi dari program ini. Kegiatan piloting dilakukan seolah hanya melibatkan satu kementerian yaitu dalam lingkungan Kementerian Keuangan saja. Hal ini menjadi sorotan penting bagi pihak inisiator melalui sebuah usaha untuk mendapatkan perhatian yang besar dalam menerapkan program SAKTI tersebut sesuai dengan PMK No.171/PMK.05/2021 yang mengamankan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

II. STUDI PUSTAKA

A. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang dibuat oleh para analis dan manajer untuk menjalankan tugas penting yang mendukung fungsi organisasi. Sistem informasi adalah sistem di dalam sebuah organisasi yang menggabungkan kebutuhan pengelolaan transaksi sehari-hari, pendukung operasional, manajerial, dan strategis, serta menyediakan informasi kepada pihak luar tertentu agar bisa memenuhi laporan yang diperlukan oleh organisasi lain [2].

Sistem informasi terdiri dari empat bagian utama, yaitu perangkat lunak (*software*),

perangkat keras (*hardware*), infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih. Keempat bagian ini saling terkait untuk membentuk sistem yang mampu memproses data menjadi informasi yang berguna [3]. Di dalamnya terdapat proses seperti perencanaan, pengontrolan, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem informasi dianggap sebagai sistem yang kompleks. Sistem informasi secara teknis didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang saling terhubung, mengumpulkan, memperoleh, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan manajemen dalam sebuah organisasi, serta membantu dalam analisis masalah dan pengembangan inovasi baru [4].

Sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem terdiri dari struktur dan proses, di mana struktur merupakan komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut. Pengertian sistem ini sangat penting dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM), karena sistem merupakan bagian utama yang dibutuhkan untuk memahami proses kerja dalam sistem procedural [5]. Sistem adalah bagian penting dari SIM yang mengatur hubungan atau interaksi berbagai elemen dalam sistem tersebut. Bentuk sistem dalam SIM adalah input, proses, output, dan feedback [6]. Keempat hal ini diperlukan dalam setiap prosedur atau perangkat kerja.

Keberadaan teknologi informasi pada instansi sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja. Penggunaannya tidak hanya sebagai alat otomatisasi dalam mengakses informasi, tapi juga sebagai media informasi yang akurat, cepat, efisien dan transparan. Hal ini dikarenakan sistem informasi dapat terintegrasi dengan sistem yang lain [7]. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya [8], yang berjudul Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Kekayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi SAKTI pada DJKN, masih diperlukan aplikasi lain yang belum terintegrasi dengan aplikasi SAKTI karena SAKTI belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi dana pihak ketiga. Dalam rangka menunjang proses pelaporan keuangan di

DJKN, sesuai dengan hasil penelitian, ditemukan bahwa aplikasi SAKTI belum sepenuhnya dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penyajian jurnal akrual terkait belanja atau pendapatan sewa pada akhir tahun.

B. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh [9]. Seluruh proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan dengan meminimalkan biaya, selain itu dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien dapat memaksimalkan nilai Perusahaan [10].

Ruang lingkup Pengelolaan keuangan yakni berkaitan dengan kebijakan-kebijakan keuangan yang harus diambil untuk mendapatkan hasil laba atau keuntungan maksimum bagi pemilik Perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan sebuah paket pengetahuan keseluruhan dan mencerminkan kekuatan serta dasar pengembangan suatu disiplin ilmu. Secara umum, tujuan dari pengelolaan keuangan meliputi :

- a. Mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang
- b. Melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki
- c. Mengatur arus kas (pemasukan dan pengeluaran uang)
- d. Melakukan manajemen risiko dan mengatur risiko dengan baik
- e. Mengelola utang piutang

C. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SPAN adalah singkatan dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara yang juga dioperasikan secara online berbasis web. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep *single database*. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas

akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, dan akuntansi berbasis aktual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja (SATKER) dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul *General Ledger* dan Pelaporan (GLP).

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan sarana interkoneksi SPAN dan SAKTI yang utama. Satker tidak perlu secara langsung datang ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK), namun cukup masuk ke Portal SPAN dan mengakses menu yang ada untuk melakukan pengiriman ADK ke SPAN. Sebaliknya, penerimaan data dari SPAN juga akan dilakukan melalui Portal SPAN, sehingga satker tidak perlu lagi datang ke KPPN. Portal SPAN juga digunakan untuk melakukan validasi atas ADK yang dikirimkan oleh Satker. Validasi merupakan tanda bukti bahwa ADK berasal dari Satker yang benar dan telah diketahui dan disetujui oleh pejabat berwenang.

Adapun contoh penerapan aplikasi SAKTI berdasarkan informasi awal yang diperoleh di Sekretariat Panwaslih Aceh Singkil adalah pada saat membayar gaji atau honor pegawai. Terdapat dua mekanisme dua mekanisme, yaitu Pencairan Dana Langsung (LS) dan Pencairan Dana Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS secara umum dapat digunakan untuk belanja pegawai (gaji, tunjangan, honor dan lembur) dan non pegawai

(pengadaan barang dan jasa; pembayaran biaya tagihan langganan daya dan jasa seperti listrik, air dan telepon). Sedangkan UP yang menjadi uang muka satuan kerja dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Uang persediaan dapat diberikan kepada setiap satuan kerja (SATKER) sebagai pendanaan awal kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelayanan kepada satker dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan identitas satker dengan menunjukkan kartu pengenal yang diberikan oleh KPPN dan melengkapi data yang disesuaikan dengan PIN. Setelah diperiksa oleh pegawai, satker yang memenuhi syarat diberikan SK, maka tidak mungkin terjadi kesalahan dalam proses pencairan dana. Dengan demikian, pengelolaan pegawai yang tepat akan menciptakan kinerja pegawai yang tinggi yang nantinya akan mendorong peningkatan kinerjanya. Setiap satker dapat mengangkat pejabat fungsional, dalam hal ini dapat dilakukan pengangkatan seorang Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran tersebut bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

III. METODE

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Sekretariat Panwaslih yang beralamat Jalan Singkil Rimo Km. 14 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Objek dalam penelitian ini Adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menurut Creswell salah satu jenis pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan jenis ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup partisipan tersebut [11]. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengumpulan data oleh peneliti yang kemudian diolah untuk menemukan makna dari

apa yang telah dikemukakan oleh partisipan. Fenomenologi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perjalanan hidup seseorang. Penelitian ini dilakukan dengan situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara mendalam Bagaimana Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam penelitian ini, topik penelitian yang akan dikaji adalah analisis penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) dalam pengelolaan keuangan yaitu penyelidikan dan mencari tahu bagaimana proses penyusunan, permasalahan dan solusinya yang dilakukan di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Dikembangkan Oleh Peneliti (2025)

B. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Panwaslih Aceh Singkil. Analisis dilakukan dengan jalan yang mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan dan mencatat data yang dihasilkan dari pengumpulan data di lapangan. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data dari observasi, wawancara dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan

- perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian
2. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya
 3. Mencari keterkaitan antara tema
 4. Interpretasi atas semua temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan teori yang relevan dan
 5. Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analisis kontekstual.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai metode yang mendukung untuk melengkapi data yang tidak peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumen analisis yang telah peneliti lakukan.

Hasil observasi, wawancara dan dokumen analisis yang telah dilakukan peneliti akan diolah untuk mengetahui hasil Bagaimana Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkatan Instansi (SAKTI) Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil.

Penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) tertuang dalam PMK nomor 171/PMK.05/2021 dan mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021. Awalnya aplikasi SAKTI tertuang pada PMK nomor 223/PMK.05/2015 dan nomor 131/PMK.05/2016, dimana hal tersebut berisi tahapan uji coba terbatas (piloting) yang dimulai pada tahun 2015 dan diakhiri dengan perubahan PMK yang semula dengan nomor 159/PMK.05/2018 tanggal 14 Desember 2018 berubah menjadi nomor 203/PMK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang berisi tentang piloting SAKTI. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang merupakan bagian dari IFMIS dan digunakan oleh lembaga/satuan kerja yang mengelola dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam rangka kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Aplikasi SAKTI ditujukan kepada satuan kerja untuk mendukung penerapan SPAN dalam pengelolaan keuangan yang memiliki tahapan yang dimulai dari perencanaan hingga ke pertanggungjawaban anggaran. Peneliti melakukan wawancara, observasi dan studi kepustakaan untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan

keuangan pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal dengan Kepala Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil terkait Penerapan Aplikasi SAKTI Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil. Dari hasil wawancara tersebut pegawai mengatakan: “Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil sudah menerapkan Aplikasi SAKTI sejak pertama kali aplikasi SAKTI dikeluarkan yaitu pada awal tahun 2022 dalam melakukan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dan untuk penerapannya Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil cukup maksimal namun tetap harus ada pelatihan bagi pegawai agar pegawai dapat lebih memahami penggunaan aplikasi SAKTI. Serta diharapkan peningkatan akses aplikasi ini dikarenakan terkadang aplikasi tidak bisa dibuka disebabkan oleh jaringan error”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan staf terkait adanya kebijakan aplikasi SAKTI ini peneliti memberikan pendapat bahwa Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini memberikan ketepatan pemanfaatan sumber daya (tenaga, biaya, dan waktu) sebagai input dalam Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan tujuan mencapai keluaran yang manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh Dirjen Jendral Perbendaharaan dan KPPN namun juga dirasakan oleh Sekretariat Panwaslih. Kemudian sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan, dalam aplikasi SAKTI terdapat 8 modul yaitu sebagai berikut:

1. Modul Penganggaran

Modul yang menjalankan setiap proses yang dimulai dari pembuatan rencana kerja anggaran hingga pembuatan file pelaksanaan anggaran. Ini termasuk proses penyerapan anggaran dan perencanaan pendapatan selama periode anggaran satu tahun.

2. Modul Komitmen

Modul yang melakukan aktivitas yang terkait dengan pendaftaran pemasok, data keterlibatan/kontrak, pencatatan pengiriman produk/layanan, dan tinjau pendapatan layanan.

3. Modul Bendahara

Modul bendahara merupakan bagian modul pelaksanaan anggaran yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan

penerimaan dan pengeluaran negara di bendahara yang meliputi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

4. Modul Pembayaran

Modul yang berisi surat-surat yang berisikan perintah membayar dan ringkasan tagihan yang kemudian surat tersebut harus diberikan kepada KPPN agar APBN dapat dicairkan oleh pihak yang terkait.

5. Modul Aset Tetap

Modul Aset Tetap merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan kontruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya.

6. Modul Persediaan

Untuk pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB) modul persediaan ini yang dikhususkan untuk menangani hal tersebut.

7. Modul GL dan Pelaporan

Modul yang berisi semua proses yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan.

8. Modul Administrasi

Modul yang ditujukan bagi administrator untuk mengelola konfigurasi sistem, akun pengguna, izin akses, dan pembaruan referensi.

Modul-modul yang dikembangkan merupakan upaya integrasi atas aplikasi-aplikasi sebelum diterapkannya aplikasi SAKTI dimana aplikasi-aplikasi penyusun laporan keuangan masih berupa aplikasi desktop dan belum terintegrasi satu sama lain. Modul-modul aplikasi SAKTI beserta pengembangannya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Modul SAKTI



Sumber: Panwaslih Aceh Singkil (2025)

Dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) didalamnya terdapat proses pengelolaan keuangan negara yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dari pemaparan modul diatas dapat diketahui bahwa setiap proses pengelolaan memiliki peran yang dilaksanakan oleh modul aplikasi SAKTI.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bendahara keuangan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan satker dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mengedepankan prinsip tepat waktu, namun tetap disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai yang bersangkutan sudah menerapkan modul yang ada didalam aplikasi SAKTI hanya saja diperlukan waktu dalam penggunaannya adanya keterbatasan pengetahuan sehingga pegawai harus melihat ulang kembali tutorial penggunaan aplikasi SAKTI.

Aplikasi SAKTI ini sangat membantu dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan aplikasi satuan kerja yang digunakan sebelumnya. Adapun kelebihanannya sebagai berikut:

1. Database yang digunakan terpusat.
2. Tingkat keamanan lebih tinggi dikarenakan adanya sistem penguncian data menjadi kode rahasia pada data komputer.
3. Kemudahan dalam menginstal aplikasi.
4. Dapat digunakan walaupun aplikasi tidak memiliki spesifikasi yang maksimal.
5. Konsistensi kinerja aplikasi lebih baik.

Aplikasi SAKTI ini juga memiliki berbagai kelemahan yang dapat menghambat para pengguna. Adapun kelemahannya sebagai berikut:

1. Dalam aplikasi *user* sulit untuk melakukan perbaikan, sebagai suatu sistem web-based atau data terpusat, para pengguna menjelaskan bahwa seringkali sulit untuk melakukan perbaikan bilamana terjadi sesuatu kesalahan.
2. Aplikasi SAKTI seringkali mengalami *update* dan *maintenance*. Selama masa *update* dan *maintenance* segala bentuk aktivitas pencatatan keuangan tidak bisa dilakukan sehingga menghambat pelaporan.
3. Aplikasi SAKTI sebagai suatu sistem terpusat menyebabkan akses *website* yang lambat sehingga tak jarang para pengguna kesulitan untuk mengakses web SAKTI.

V. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disusun sebelumnya dan sesuai dengan data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil telah menerapkan aplikasi SAKTI sejak awal tahun 2022, walaupun masih sangat baru tetapi dalam penerapannya sudah cukup efektif dan optimal namun dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Panwaslih, Aplikasi SAKTI belum bisa menjamin resiko kesalahan dalam modul administrasi terkait pengelolaan data referensi dan data *user* SAKTI. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti adanya kesiapan sarana internet yang lancar dan adanya kesiapan video tutorial penerapan aplikasi agar kendala yang terdapat di lapangan dapat diantisipasi lebih cepat sehingga tidak mengganggu pengelolaan keuangan negara.

REFERENSI

- [1] Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A, “Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)”, *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 3(1), 64-72, 2023.
- [2] Leitch, H, “*Application of Information System to Increasing*”. New York: Shemarad Books, 2012.
- [3] Pratama, I. P, “*Sistem Informasi dan Implementasinya*”. Bandung: Informatika, 2014.
- [4] Lukman Ahmad, M, “*Sistem Informasi Manajemen*”. Lemabaga KITA: Banda Aceh, 2018.
- [5] Hall, G, “*Information System in Company*”. New York: John Wiley and Son, 2016.
- [6] McLeod, R. J, “*Sistem Informasi Manajemen*”. Jakarta: PT.Prenhallindo, 2012.
- [7] Lisnawati, Payana, M. D., & Lestari, S, “Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Desa Berbasis Teknologi Di Gampong Klieng Meuria”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat INOTEC UII*, 4(2), 69-72, 2022.
- [8] Perdana, F. I, “Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pada Di Rektorat Jenderal Kekayaan”. Bogor, 2022.
- [9] Kasmir, “*Pengantar Manajemen Keuangan*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- [10] Hartati, S, “Manajemen Keuangan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. 2013.
- [11] Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.